

Media Gathering Isu Lingkungan Dalam Bingkai Media Sepanjang 2020

- Yayasan KEHATI dan
- Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
- 03 Desember 2020

- **Untung Widyanto**
- Anggota SIEJ
- untungwidyanto@yahoo.com
- WA: 0878-7856-0144

Potret Media di Indonesia

- Ross Tapsell (2017), “Media Power di Indonesia Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution,”: ada sebelas konglomerat digital yang mengendalikan media di Indonesia melalui kontrol televisi, radio, media cetak dan online.
- Yanuar Nugroho, dkk (2012),”Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia”:
- 1. Pemilik media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa diperlakukan hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang sah. Konsentrasi industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar perusahaan-perusahaan media telah mengancam semangat ‘keragaman kepemilikan’ dan ‘keragaman informasi’ di media.
- 2. Sebagai alat untuk kekuasaan, media menanggung bias yang tidak dapat dihindari karena adanya intervensi dari pemilik media, yang juga termasuk keharusan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan korporasi ketika menciptakan konten (terutama konten berita), serta mendistribusikannya kepada pemirsa. Informasi publik di media menjadi hak istimewa dari industri: mereka mengkonstruksinya dan pada saat yang sama mengkontestasikan konten tersebut dengan media lainnya. Hasilnya, warga negara hanya terpapar oleh informasi yang terbatas, karena kebanyakan isu-isu penting yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan politik disampaikan oleh media secara selektif.
- 3. Sebagian besar perusahaan media merujuk pada rating dalam memproduksi kontennya. Acara-dengan rating tinggi akan diduplikasi, sehingga menghasilkan duplikasi konten. Alhasil, media cenderung untuk beroperasi dengan merekayasa keinginan warga negara kemudian mengklaimnya sebagai kebutuhan. Dengan cara itulah media membentuk opini publik dan kepentingan publik dalam berbagai isu.

- **Apa Isu Kehutanan yang Mengemuka di Tahun 2020:**

1. Menteri LHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia (Februari)
2. Hutan Adat Laman Kinipan-Penangkapan Effendi Buhing (Agustus)
3. Menteri Siti Nurbaya dan Hutan Harapan (Agustus)
4. Karhutla – Penegakan Hukum untuk Korporasi (September)
5. Omnibus Law – Sektor Kehutanan (Oktober)
6. Perusahaan Sawit Korindo Bakar Hutan di Papua (November)
7. Peraturan Menteri LHK: Hutan Lindung Bisa untuk Food Estate (November)

- **Riset sederhana dengan sampel media:**

A. Independen: kompas.com dan tempo.co

B. Pengusaha/partai/pemerintah: mediaindonesia.com dan republika.co.id

C. Pengusaha/non partai: detik.com dan bisnis.com



Bagaimana Isu
Kehutanan
dalam
Bingkai/Kaca-
mata Media?

Tabel: Jumlah berita pada media berdasarkan tujuh isu kehutanan (2020)

MEDIA \ ISU	1	2	3	4	5	6	7	KETERANGAN
Kompas.com	1	14	0	0	32	20	6	1. Keyword (KW): WWF Indonesia, Siti Nurbaya [04 Feb] 2. KW Laman Kinipan, Effendi Buhing 3. KW: Siti Nurbaya, Hutan Harapan 4. KW: Kebakaran hutan, perusahaan KW: karhutla, pelaku: ada banyak 5. KW: Omnibus law, hutan 6. KW: Korindo, Sawit BBCIndonesia.com kerja sama dengan Kompas.com 7. KW: Siti Nurbaya, food estate
Tempo.co	8	36	10	6	42	2	4	
Mediaindonesia.com	1	1	0	5	30	3	6	
Republika.co.id	4	1	0	7	50	3	0	
Detik.com	3	16	0	7	40	13	4	
Bisnis.com	3	2	0	10	--	1	-	

Metode: untuk mengetahui jumlah berita dengan memasukkan kata kunci (keyword/KW) ke dalam search engine masing-masing media online

KLHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia



Keputusan KLHK Memutus Kerja Sama dengan WWF Dinilai Sudah Tepat

NASIONAL

03 Februari 2020
11:13 WIB

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia merupakan langkah tepat.



WWF Indonesia Kecewa KLHK Putuskan Kerja Sama

AGRIBISNIS

27 Januari 2020
09:53 WIB

Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyayangkan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



KLHK Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia

AGRIBISNIS

24 Januari 2020
18:22 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia.

Bisnis.com

Mediaindo
nesia.com

Senin 03 Februari 2020, 12:47 WIB

DPR RI Dukung Langkah KLHK Akhiri Kerja Sama dengan WWF Indonesia

mediaindonesia.com | Humaniora



Jalimewa

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mendukung KLHK yang memutus hubungan kerja sama dengan WWF Indonesia.

ANGGOTA Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, serta Bulog, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Sebab ada pihak lain yang menikmati kerja sama tersebut.

Dukungan tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, yang menanggapi keputusan tegas yang diambil KLHK yakni memutus hubungan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia itu.



KLHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia

Berlangganan Login METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS NUSANTARA LAINNYA

WWF kepada Menteri Siti: Saya Tahu Ibu Punya Hati Nurani

Oleh: Tempo.co
Senin, 21 September 2015 10:32 WIB

0 KOMENTAR



Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada perusahaan Malaysia yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Efransjah meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk berani menindak para oknum perusak lingkungan.

"Hutan dan air adalah basis utama ekosistem. Di planet bumi ini, manusia sebagai khalifahny. Sifat manusia adalah serakah. Mereka merusak hutan yang menjadi basis ekosistem, untuk memenuhi keinginannya. Kami bukan pembuat keputusan, yang bisa memutuskan Ibu. Saya tahu Ibu punya hati nurani, jadi setelah mendengar kami, Ibu lakukan saja," kata Efransjah, dalam pidato pada acara Peringatan Hari Perdamaian Dunia dan Deklarasi Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (Siaga Bumi), di Taman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup, Senin, 21 September 2015.

Investasi dengan eksekusi langsung & cepat

Bantuan 24/5, platform desktop, tablet, mobile

Broker multi-penghargaan, multi-regulasi

Buka Akun

Layanan kami melibatkan risiko signifikan dan bisa mengakibatkan kerugian modal investasi Anda. S&K

- 1 Hari Ulang Tahun OPM, Puluhan Orang Gelar Aksi di Monas
- 2 Ribuan Pastor dan Suster Galang Dana Guru Honorer Lewat Olahraga Virtual
- 3 KNPB Sebut Tak akan Ada Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2020
- 4 Kapolri Idham Azis Perintahkan Tembak Mati Kelompok MIT Ali Kalora
- 5 Kata PP Muhammadiyah Soal Heboh Video Azan Mengajak Berjihad

pegipegi FLASH SALE JAMN DISKON HOTEL 50% OFF

Acronis Healthcare has evolved. Your IT should too. Discover Cyber



detikNews Rabu, 29 Jan 2020 20:09 WIB

Akhir Cerita KLHK dengan WWF Indonesia



detikNews Rabu, 29 Jan 2020 12:30 WIB

Alasan KLHK Putus Kerja Sama WWF Indonesia: Ada Klaim Sepihak Fakta Lapangan



detikNews Rabu, 29 Jan 2020 11:38 WIB

KLHK Putus Kerja Sama, WWF Indonesia Menyayangkan



REPUBLICA.co.id
Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020



Kementerian LHK: WWF Indonesia Rugikan Reputasi Sendiri

Friday, 31 Jan 2020 17:55 WIB

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyayangkan pernyataan Yayasan WWF Indonesia yang mengklaim bahwa pengakhiran kerja sama oleh KLHK merupakan tindakan sepihak dan merugikan reputasi WWF...



Soal WWF, Komisi IV DPR RI Minta Penjelasan KementLHK

Wednesday, 29 Jan 2020 23:06 WIB

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakhiri kerja sama dengan Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Oleh karena itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat...



Soal WWF, Kementerian LHK: Seharusnya Saling Menghormati

Wednesday, 29 Jan 2020 21:37 WIB

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- WWF Indonesia menyampaikan permohonan maafnya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyusul keputusan KLHK yang memutuskan kerja sama yang terjalin sejak 1998 silam. KLHK...



KLHK-WWF Indonesia 'Bubaran', 30 Proyek Konservasi Terdampak

Wednesday, 29 Jan 2020 08:01 WIB

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutuskan kerja sama secara sepihak dengan WWF Indonesia.

Hutan Adat Laman Kinipan, Kalteng: Penangkapan Effendi Buhing

Bisnis.com



Mengapa Effendi Buhing Perintahkan Merampas Gergaji Mesin?

Polisi menyebutkan kasus penangkapan Buhing bermula dari kasus perampasan chainsaw alias gergaji mesin.

28 Agustus 2020
08:37 WIB



Polda Kalteng Tangkap Kepala Adat Laman Kinipan, Ini Alasannya

Polisi menduga Kepala Adat Laman Kinipan Effendi Buhing menyuruh orang untuk melakukan aksi kriminal terhadap PT Sawit Mandiri Lestari di Lamandau, Kalimantan Tengah.

27 Agustus 2020
11:27 WIB

Kamis 10 September 2020, 10:12 WIB

Ada Pro Kontra Status Hutan Kinipan

mediaindonesia.com | Nusantara



JICA/ANI
Ilustrasi

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong bersama rombongan termasuk mitra kerja KLHK yaitu Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan dua anggota lainnya, Darori Wonodipuri dan Bambang Purwanto mengunjungi Lamandau, Kalimantan Tengah, Rabu (9/8).

Kedatangan rombongan Wamen KLHK dan Komisi IV DPR RI ini respons terhadap polemik yang sempat viral yakni sengketa antara warga yang mengatasnamakan masyarakat adat Laman Kinipan di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa. Komunitas ini menolak adanya aktivitas perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).



Babak Baru Viral Penangkapan Effendi Buhing Berujung Laporan ke Komnas HAM



Dilaporkan ke Komnas HAM, Polda Kalteng: Effendi Buhing Tak Kooperatif



Effendi Buhing Laporkan Polda Kalteng ke Komnas HAM Terkait Penangkapan



Effendi Buhing Jadi Tahanan Kota, Polisi: Dia Janji Kooperatif



Video Ditangkap-Diseret Viral, Effendi Buhing Ngaku Diperlakukan dengan Baik



Tuduhan Kriminalisasi Iringi Penangkapan Tokoh Adat Kinipan



Komisi III DPR Minta Kapolri Telusuri Proses Penangkapan Tokoh Adat Kinipan



Ketua Adat Kinipan Dijemput Polisi, AMAN: Seperti Tangkap Teroris!



Effendi Buhing Sebut Peristiwa Penangkapan Dirinya karena Salah Paham



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 16:49 WIB

Detik-detik Tokoh Adat Kinipan Effendi Buhing Ditangkap di Kalteng



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 15:45 WIB

Dianggap Kriminalisasi Effendi Buhing, Polisi: Uji Saja di Praperadilan



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 15:31 WIB

Anggota Komisi III Janji Call Informasi Penangkapan Tokoh Adat Kinipan



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 14:00 WIB

Duduk Perkara Penangkapan Tokoh Adat Kinipan Effendi Buhing



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 13:46 WIB

KNPA: Penangkapan Effendi Buhing di Kalteng Bentuk Kriminalisasi



dotikNews Kamis, 27 Agu 2020 12:06 WIB

Viral Tokoh Adat Kinipan di Kalteng Ditangkap, Polisi Jelaskan Kasusnya

AKAR PERANG
PREMAN MALUKU

KEMBANG-KEMPIS
BISNIS PLN

TEMPO

ENAK DIBACA DARI LU

KEBIJAKAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SITI NURBAYA MENGANCAM KELESTARIAN HUTAN RESTORASI DI JAMBI DAN SUMATERA SELATAN. PENGUSAHA BATU BARA DIUNTUNGAN.

INVESTIGASI

PETAKA HUTAN HARAPAN



31 AGUSTUS 2016
RP 45.000
WWW.TEMPO.CO
MAJALAH BERTA
MINGGUAN



Menteri LHK Siti Nurbaya dan Hutan Harapan

Kamis 29 September 2016, 01:51 WIB

Kawasan Restorasi Ekosistem Diperluas

Richalfo Y Harlandja | Humaniora



ANTARA/WARREN SEPTIYAWAN

KAWASAN restorasi ekosistem (RE) di kawasan hutan produksi yang digagas pemerintah sejak 2004 silam melalui SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi ditargetkan untuk ditambah. Jika pada sejak 2004 baru terdapat 15 kawasan RE dengan luas 373 ribu hektare, pemerintah sudah mengalokasikan 1,65 juta hektare kawasan RE yang akan dibentuk hingga 2019.

"Konsep utamanya kan untuk areal yang sudah overlog atau sudah jelek, lalu konservasinya seperti apa, keanekaragaman hayatinya, dan juga dilakukan bersama masyarakat," ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat ditemui dalam kunjungan kerja di kawasan Hutan Harapan, Batanghari, Jambi, kemarin.

Mediaindonesia.com, 29 Sep 2016



Laporan Utama
JEJAK KORPORASI PENYULUT GENI

KEBAKARAN hutan dan lahan di Indonesia kembali meluas pada 2019. *Tempo*, *Mongabay*, dan masyarakat sipil Auriga Nusantara berkolaborasi untuk menelusuri jejak api di pul...

Analisis citra satelit dan pengecekan lapangan di konsesi tiga perusahaan mengy... yang tahun lalu membuat ekonomi Indonesia merugi hingga Rp 75 triliun ter... berpotensi memicu bahaya serupa di masa depan.

Liputan ini terselenggara atas kerja sama Pulitzer Center melalui pr...



Laporan Utama
MENGANTANG ASAP PEMBAKAP

Korporasi pembakar hutan tak mendapat p...



Laporan Utama
KOREK API BERNAMA REGULAS

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang... lingkungan. Bahaya baru bagi hutan dan gambut.



Laporan Utama
DUA NYAWA BUTOGENI

Kolaborasi media lintas negara dan kelompok masyarakat sipil mengungkap dugaan... hutan 2019 di Indonesia. Kerja setahun berbagi keahlian.

Kebakaran Hutan dan Lahan – Perusahaan

PARA PENCEMAR
BENGAWAN SOLO

BABAK BARU
KOMPLOTRAN JOKER

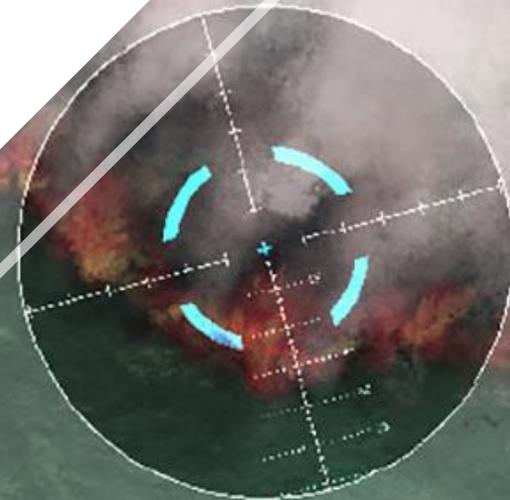
TEMPO

ENAK DIBACA DAN PERLU

INVESTIGASI

KORPORASI API

bersama *Mongabay*, *Betahita*, *Malysiakini*, dan... menemukan jejak keterlibatan sejumlah perusahaan... kebun sawit dalam kebakaran hebat setahun lalu.



Omnibus Law – Sektor Kehutanan

Menteri LHK : UU Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja

<https://mediaindonesia.com/.../351240-menteri-lhk-uu-omnibus-law-untuk-ciptakan-lapangan-kerja>

8 Okt 2020 ... Menteri LHK : UU Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja ... (adat) dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan," ujar Menteri ...

Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Keberpikahan Pemerintah

<https://mediaindonesia.com/.../351420-perhutanan-sosial-di-uu-cipta-kerja-wujud-keberpikahan-pemerintah>

9 Okt 2020 ... UU Omnibus Law merupakan wujud nyata keberpikahan pemerintah ... berada di sekitar hutan dan kawasan hutan, melalui akses legal.

Menteri LHK Bantah Omnibus Law Lemahkan Perlindungan ...

<https://mediaindonesia.com/.../291602-menteri-lhk-bantah-omnibus-law-lemahkan-perlindungan-lingkungan>

21 Feb 2020 ... Rakyat yang menerima hutan sosial juga bagian dari itu. Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus. Jadi tidak benar ...

DPR RI Minta Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

<https://mediaindonesia.com/.../291348-dpr-ri-minta-pemerintah-lakukan-rehabilitasi-hutan-dan-lahan>

20 Feb 2020 ... Merespon mengenai rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Menteri Siti ... pengendalian konflik satewa liar, dan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

Soal Omnibus Law, Hipmi: Harmonisasi UU Kehutanan - UU Tata ...

<https://mediaindonesia.com/.../281546-soal-omnibus-law-hipmi-harmonisasi-uu-kehutanan-uu-tata-ruang>

6 Jan 2020 ... Ketika Kepala Daerah mengeluarkan izin lokasi di atas Hutan Produktif, bisa saja bermasalah dikemudian hari. Sebab dianggap tidak sesuai ...

RUU Cipta Kerja Lindungi Usaha Masyarakat Di Sekitar Hutan

<https://mediaindonesia.com/.../349894-ruu-cipta-kerja-lindungi-usaha-masyarakat-di-sekitar-hutan>

3 Okt 2020 ... Omnibus Law ini akan membuat penyederhanaan proses perizinan pendirian usaha dan investasi di Indonesia. Misalnya beberapa pasal dalam ...

Semua Aturan dan UU Hambat Investasi Harus Masuk RUU ...

<https://mediaindonesia.com/.../280407-semua-aturan-dan-uu-hambat-investasi-harus-masuk-ruu-omnibus-law>

29 Des 2019 ... RUU biasa disebut RUU Omnibus Law saja merupakan usulan ... lingkungan dan hutan, apalagi hutan kita merupakan bagian penting dari ...

Adkasi Dukung Omnibus Law dengan Syarat

<https://mediaindonesia.com/.../296546-adkasi-dukung-omnibus-law-dengan-syarat>

14 Mar 2020 ... Seluruh Indonesia (Adkasi) mendukung omnibus law rancangan ... HPH itu memang kewenangan pusat, karena itu hutan itu tidak otonomi.

Omnibus Law Bagian dari Reformasi Birokrasi di Indonesia

<https://mediaindonesia.com/.../289906-omnibus-law-bagian-dari-reformasi-birokrasi-di-indonesia>

13 Feb 2020 ... Whana menegaskan, nantinya RUU dengan skema omnibus law itu akan ... Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) ...

Di RUU Omnibus Law, Perusak Lingkungan Tetap Ditindak Tegas

<https://mediaindonesia.com/.../290068-di-ruu-omnibus-law-perusak-lingkungan-tetap-ditindak-tegas>

14 Feb 2020 ... Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap ...

Pemberitaan mediaindonesia.com

Kamis 08 Oktober 2020, 20:16 WIB

Menteri LHK : UU Omnibus Law untuk Ciptakan Lapangan Kerja

mediaindonesia.com | Humaniora



MENLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

UNDANG-undang Cipta Kerja (UU CK) yang dikenal sebagai UU Omnibus Law, sangat penting, selain sesuai dengan tujuan utamanya untuk penciptaan lapangan kerja sehingga menyederhanakan prosedur perizinan dan mengatasi hambatan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru,

"UU Cipta Kerja juga penting dalam menyelesaikan masalah menahun berkaitan dengan masalah-masalah konflik tenurial terkait kawasan hutan, kriminalisasi masyarakat lokal (adat) dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, Kamis (8/10) dalam keterangan tertulisnya.

KLHK Jamin Omnibus Law Tajam bagi Perusak Lingkungan

<https://mediaindonesia.com/.../290498-klhk-jamin-omnibus-law-tajam-bagi-perusak-lingkungan>

17 Feb 2020 ... menjerat para pembakar hutan, pencemar, dan perusak lingkungan karena pasal pidana tetap dipertahankan. Pada RUU Omnibus Law ini, ...

Menteri Siti Nurbaya : RUU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat

<https://mediaindonesia.com/.../291561-menteri-siti-nurbaya-ruu-cipta-kerja-untuk-kesejahteraan-rakyat>

21 Feb 2020 ... "Melalui Omnibus Law, program Perhutanan Sosial dan TORA akan berarti lebih kembang. UMKM dari kegiatan sekitar hutan akan hidup tanpa ...

BLI Dilebur dengan BRIN, Menteri LHK Siapkan Badan Baru

<https://mediaindonesia.com/.../329076-bli-dilebur-dengan-brin-menteri-lhk-siapkan-badan-baru>

17 Jul 2020 ... dengan rencana implementasi RUU Cipta Kerja Omnibus Law ... kita juga akan memperkuat di law enforcement, di pengawasannya, dan ...

KLHK Fokus Rehabilitasi Hutan dan Lahan

<https://mediaindonesia.com/.../293230-klhk-fokus-rehabilitasi-hutan-dan-lahan>

28 Feb 2020 ... Pada sesi terakhir sebagai penutup, secara khusus akan mengangkat tema mengenai RUU Omnibus Law yang langsung dimoderatori Menteri ...

RUU Cipta Kerja Atur Perusahaan untuk Cegah Karhutla

<https://mediaindonesia.com/.../293200-ruu-cipta-kerja-atur-perusahaan-untuk-cegah-karhutla>

28 Feb 2020 ... "Jadi dalam Omnibus Law diperkuat lagi penegakan tentang pencagahan adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Koneksi hutan ...

Menimbang Usulan Omnibus Law

<https://mediaindonesia.com/read/.../278935-menimbang-usulan-omnibus-law>

20 Des 2019 ... Presiden Joko Widodo menyampaikan idenya untuk membuat suatu terobosan hukum dalam bentuk skema omnibus law.

Pemerintah Berkomitmen Lindungi Hutan Adat

<https://mediaindonesia.com/.../35188-pemerintah-berkomitmen-lindungi-hutan-adat>

30 Des 2016 ... PRESIDEN Joko Widodo mearnangkan sembilan hutan adat seluas 13.100 ... KPAI Sayangnya Anak-anak Terlibat Demo Omnibus Law.

Luhut Pastikan Perusahaan Pembakar Hutan Masuk dalam Daftar ...

<https://mediaindonesia.com/.../19672-luhut-pastikan-perusahaan-pembakar-hutan-masuk-dalam-daftar-tilam>

16 Sep 2015 ... Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan telah membahayakan kehidupan ... Proses Demokrasi Pengesahan Omnibus Law Ciptaker.

Catat, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus Law

<https://mediaindonesia.com/.../350389-catat-inilah-janji-pemerintah-usai-pengesahan-omnibus-law>

5 Okt 2020 ... Catatan, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus Law ... tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ...

DPD Berkomitmen Wujudkan Hutan Lestari

<https://mediaindonesia.com/.../194120-dpd-berkomitmen-wujudkan-hutan-lestari.html>

29 Okt 2018 ... "Kami mengamati bahwa hutan Indonesia mengalami kerusakan serius sebagai ... 240 Pendemo Omnibus Law di Proses Pidana, 87 Ditahan.

Perusahaan Sawit Korindo Bakar Hutan di Papua

KOMPAS.com NEWS TREK HEALTH FOOD **BARU** EDUKASI INSPIRASI MONEY TEKNO LIFESTYLE HOMEY **BARU** PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS HYPE VIK KOLOM JEO IMAGES

BAGIKAN: [Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel Bakar Hutan Papua untuk Perluasan Lahan Sawit](#) KOMENTAR:

BBC NEWS | INDONESIA

Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel Bakar Hutan Papua untuk Perluasan Lahan Sawit

Kompas.com - 12/11/2020, 18:48 WIB

BAGIKAN:

[Lihat Foto](#)



Vener ini 100 kali Nuari Ganti Hilan!

XM
• 10 YEARS ANNIVERSARY •

Mulai dari
Bonus 15%
Hingga \$500*

Investasi dengan eksekusi langsung cepat

[Close Ads X](#)



INDUSTRI MINYAK SAWIT : Ekspansi Pabrik Korindo Terhambat

AGRESIS Korindo Group berencana ekspansi produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menjawab peningkatan permintaan pasar domestik. Namun, rencana tersebut terhambat kampanye negatif deforestasi.

10 September 2019
02:00 WIB



Kampanye Negatif Korindo, Ekspansi Produksi CPO Tertahan

AGRESIS Korindo Group menyatakan kampanye negatif terhadap perseroan membuat rencana ekspansi produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tertahan.

09 September 2019
23:46 WIB



Korindo Kembangkan CSR Kewirausahaan

AGRESIS Perusahaan produsen plywood dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang beroperasi di Merauke, Korindo Group mengembangkan program-program pengembangan masyarakat berbasis kewirausahaan.

21 Oktober 2016
13:12 WIB



Korindo Bantah Bakar Hutan Papua

AGRESIS Grup Korindo, kelompok bisnis kehutanan dan perkebunan asal Korea Selatan, membantah telah membakar lahan konsesi secara sengaja untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

05 September 2016
16:55 WIB

detikNews > Berita

Round-up Polemik Investigasi Perusahaan Korsel Dituding Bakar Hutan Papua

Hostiana Dharmastuti - detikNews
Sabtu, 14 Nov 2020 23:03 WIB



Jakarta - Investigasi Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia terkait kebakaran hutan untuk perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) menjadi polemik. Begini duduk pemasalahannya.

Awalnya, sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan 'secara sengaja' menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit.

Masyarakat suku Malind, yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Mereka sedih karena hutan adatnya di pedalaman Merauke kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit.



Korindo Bantah Pembakaran Hutan untuk Kebun Sawit

<https://mediaindonesia.com/.../korindo-bantah-pembakaran-hutan-untuk-kebun-sawit>

19 Nov 2020 ... PERUSAHAAN sawit, Korindo Group membantah telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit di Papua.

Petani Sawit Korindo Bantah Tuduhan LSM TuK Indonesia

<https://mediaindonesia.com/.../203486-petani-sawit-korindo-bantah-tuduhan-lsm-tuk-indonesia>

10 Des 2018 ... TUDINGAN lembaga swadaya masyarakat terhadap Korindo yang beroperasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dibantah keras oleh ...

Potensi Persaingan Dagang Di Balik Kampanye Hitam Terhadap ...

<https://mediaindonesia.com/.../266127-potensi-persaingan-dagang-di-balik-kampanye-hitam-terhadap-sawit>

17 Okt 2019 ... Pasalnya, sawit Indonesia berhasil menggeser dominasi kedelai sebagai ... Salah satu pelaku industri kelapa sawit nasional, Korindo Group, ...

Warga Boven Digoel Kecam Manuver LSM Asing

<https://mediaindonesia.com/.../258635-warga-boven-digoel-kecam-manuver-lsm-asing>

10 Sep 2019 ... Ditemui di Jakarta, Sustainability Manager Korindo Group Luyw Leunifna mengingatkan kepada LSM terkait bahwa usaha kelapa sawit ...

Komnas HAM: Tidak Ada Bukti Korindo Group Terkait Kematian ...

<https://mediaindonesia.com/.../327126-komnas-ham-tidak-ada-bukti-korindo-group-terkait-kematian-marius>

10 Jul 2020 ... Sejumlah LSM di Papua menuding kematian Marius di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Tulus Sawa Erma POPA Camp 19 dicalitkan ...

Korindo bakal Bangun Hutan Kota di Sekitar Stadion Pakansari

<https://mediaindonesia.com/.../274562-korindo-bakal-bangun-hutan-kota-di-sekitar-stadion-pakansari>

28 Nov 2019 ... PERUSAHAAN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, Korindo Group dalam waktu dekat ini berencana untuk membangun ...

#Kelapa Sawit

<https://mediaindonesia.com/tag/detail/kelapa-sawit>

PERUSAHAAN sawit, Korindo Group membantah telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit di Papua. IstiKLHK. Dijen ...

Korindo Group Bantu Korban Gempa Halmahera Selatan

<https://mediaindonesia.com/.../252994-korindo-group-bantu-korban-gempa-halmahera-selatan.html>

12 Agu 2019 ... Bantuan air bersih dari PT Galora Mandiri Membangun (GMM), unit usaha perkebunan kelapa sawit Korindo Group. PADA Juli lalu, gempa ...

Kelapa Sawit, Emas Hijau yang Terus Diusik Keberadaannya

<https://mediaindonesia.com/.../264661-kelapa-sawit-emas-hijau-yang-terus-diusik-keberadaannya>

10 Okt 2019 ... KELAPA sawit, tak diragukan, merupakan salah satu komoditas ... yang tengah diserang kampanye hitam tersebut yakni Korindo Group.

Pemerintah pastikan tidak ada deforestasi di Papua

<https://mediaindonesia.com/.../260303-pemerintah-pastikan-tidak-ada-deforestasi-di-papua>

18 Sep 2019 ... Tidak boleh sembarangan dalam mengelola sawit, membatasi hutan ... tahun, telah terjadi deforestasi yang diduga dilakukan oleh Korindo.

Perusahaan Sawit Korindo Bakar Hutan di Papua



REPUBLIKA.co.id

Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020



FSC Akui tak Bisa Buktikan Korindo Merusak Hutan

Friday, 20 Nov 2020 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forest Stewardship Council (FSC), organisasi pengelolaan hutan lestari menegaskan bahwa Grup Korindo memang telah melakukan perusakan wilayah hutan dalam pembukaan lahan konsesi sawit di Papua. Namun, hasil investigasinya...



Korindo Bantah Bakar Hutan Papua

Wednesday, 18 Nov 2020 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grup Korindo membantah adanya pelanggaran lingkungan dalam pembukaan lahan perkebunan sawit di Papua. Sebelumnya hasil investigasi Greenpeace International dan Forensic Architecture, sebuah lembaga penelitian kolektif yang berbasis...



Korindo Group Kirimkan Bantuan 120.000 Masker ke Papua

Thursday, 09 Apr 2020 12:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korindo Group pada hari ini (Kamis, 9/4) secara simbolis menyerahkan bantuan sebanyak 120.000 lembar masker untuk masyarakat Papua. Bantuan diserahkan Senior Vice Chairman Korindo Group, Mr...



Korindo Ajari Masyarakat Papua Bercocok Tanam

Sunday, 27 Oct 2019 03:55 WIB

Untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi pada masyarakat yang

Permen LHK Hutan Lindung Bisa Jadi Food Estate

Mediaindonesia.com

Menteri LHK: Food Estate Sumut Tidak Turunkan Kualitas Lingkungan

<https://mediaindonesia.com/.../347250-menteri-lhk-food-estatesumut-tidak-turunkan-kualitas-lingkungan>



23 Sep 2020 ... MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri **Siti Nurbaya** menegaskan bahwa dalam pengembangan food estate atau ...

KLHK: Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Jadi Pedoman Food ...

<https://mediaindonesia.com/.../361434-klhk-permen-lhk-nomor-24-tahun-2020-jadi-pedoman-food-estate>



17 Nov 2020 ... Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan Food Estate adalah kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya ...

Presiden Jokowi Didampingi Mentan Tinjau Food Estate di Humbahas

<https://mediaindonesia.com/.../356201-presiden-jokowi-didampingi-mentan-tinjau-food-estate-di-humbahas>



27 Okt 2020 ... (LHK), **Siti Nurbaya** Bakar dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ... Di sini sesuai dengan rencana akan dikerjakan food estate.

Food Estate di Humbahas akan Produksi Kentang dan Bawang

<https://mediaindonesia.com/.../356132-food-estate-di-humbahas-akan-produksi-kentang-dan-bawang>



27 Okt 2020 ... dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **Siti Nurbaya** Bakar, ... Di sana akan dibangun food estate khusus untuk padi dan untuk ...

Berita #lingkungan hidup terkini dan terbaru hari ini ...

<https://mediaindonesia.com/tag/lingkungan-hidup>



MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri **Siti Nurbaya** menegaskan bahwa dalam pengembangan food estate atau lumbung pangan di ...

#KLHK

<https://mediaindonesia.com/tag/detail/klhk/660>



20 Jul 2020 ... Semua Pihak harus Samakan Persepsi tentang Food Estate di ... Pada HUT ke- 75 Pajak, Menteri LHK **Siti Nurbaya** Terima Penghargaan.

Menteri Siti : UU Cipta Kerja tak Hapuskan Amdal

<https://m.mediaindonesia.com/.../351010-menteri-siti-uu-ciota-kerja-tak-haouskan-amdal>



detikNews Selasa, 17 Nov 2020 07:44 WIB

Penjelasan KLHK soal Hutan Lindung Bisa Diubah Jadi Food Estate



detikNews Selasa, 17 Nov 2020 05:57 WIB

Kritik Hutan Lindung Jadi Food Estate, Komisi IV Bicara Kerusakan Lingkungan



detikNews Senin, 16 Nov 2020 14:25 WIB

Permen LHK Terbaru: Hutan Lindung Bisa Diubah Jadi Food Estate



detikFinance Selasa, 23 Jun 2020 20:00 WIB

Lahan Rawa di Kalteng Siap Digarap Jadi Sawah Baru Bulan Depan



Ini Perkembangan Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah

dan lahan potensial yang mencapai luas 145.000 hektare, saat ini luas area dengan jaringan irigasi baik mencapai 20.000 hektare, sisanya dalam pekerjaan rehabilitasi.



Walhi Minta Permen Food Estate Dicabut, Ini Alasannya

Walhi meminta pemerintah mencabut peraturan menteri tentang food estate. Sejumlah perubahan melasibekakang pemerintahan tersebut di antaranya 26,57 persen kawasan hutan di Indonesia telah dikavling untuk kepentingan bisnis korporasi.



Warga Dua Kabupaten di Sumut Bakal Diberi Lahan 1 Hektare

hingga saat ini, ada 1.000 hektare lahan food estate yang terbelak di kabupaten Humbang-Hasundun yang telah digarap dan ditanami bawang putih, kentang, dan bawang merah.



Ini Pekerjaan Utama Karya pada Proyek Food Estate di Kalteng

Dalam kerja sama operasi Hutama Karya, Wjaya Karya, dan Adipatra pada proyek ini, perusahaan memegang 27,5 persen pekerjaan.



Hutan Berizin Ditargetkan 70 Persen dikuasai Swasta, 30 Persen Rakyat

Pemerintah menargetkan kelangkaan usaha perhutanan sosial dapat dimanfaatkan 12,7 juta hektare pada 2024.



Tanah Konsesi Adat TPL untuk Food Estate, Walhi: Keluar Kandang Macan, Masuk Kandang Harimau

Satu sisi kita libatkan karena pemerintah berarti mengurangi konsesi TPL, tapi di sisi lain SDA dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan untuk investasi besar. Seperti keluar kandang macan masuk kandang harimau.



Pengamat: Lumbung Pangan Belum Pengaruhi Ekonomi Sumut

Presiden RI Joko Widodo resmi membuka lahan yang akan dijadikan food estate (lumbung pangan) di Kab. Humbang Hasundun (Humbahas) Sumatera Utara pada Selasa (27/10/2020) lalu.



Jaringan Irigasi di Proyek Food Estate Kalteng Mulai Dibangun

Progres pelaksanaan di lahan Cka-PLG untuk rehabilitasi dan perbaikannya, total Rp4,2 miliar. Rp2,621 Ha telah dimulai.

Bisnis.com

Catatan dan Penutup

1. Isu Omnibus Law, hutan adat Laman Kinipan (penangkapan Effendi Buhing), pembakaran hutan di Papua oleh perusahaan sawit Korindo, dan kasus kebakaran hutan/lahan di Sumatera dan Kalimantan, banyak diberitakan media mainstream. Magnitude kasus-kasus itu memang besar dan menjadi perbincangan publik. Unjuk rasa mahasiswa dan buruh terhadap Omnibus Law berlangsung di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut juga menjadi trending topic di media sosial.
2. Pemberitaan isu kehutanan oleh mediaindonesia.com lebih menyuarakan kepentingan pemerintah dan korporasi. Pada kadar yang lebih rendah, hal itu juga dilakukan oleh bisnis.com.
3. Isu/topik KLHK memutuskan kerja sama dengan WWF Indonesia tidak terlalu banyak diberitakan media. Hanya Tempo yang melakukan indepth report dan menjadikannya laporan utama. Mediaindonesia.com dan bisnis.com memberitakan itu tersebut dengan nada pro-KLHK. Mereka mengutip anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo. Sosok ini memang selalu bersuara minor terhadap LSM dan pro kepada perusahaan.
4. Laporan utama Tempo edisi 3 Agustus 2020 menyorot tentang izin dari Menteri LHK Siti Nurbaya kepada cicit usaha Rajawali Corpora milik taipan Peter Sondakh untuk membangun jalan angkut batu bara di Hutan Harapan (Jambi dan Sumatera Selatan). Menteri LHK merevisi aturan yang melarang jalan tambang di area restorasi sebelum menerbitkan izin tersebut. Sayangnya, tidak ada media lain yang mengutip atau memberitakan kasus tersebut. Hal itu menunjukkan egoisme dan jaga gengsi antar media terus berlangsung.

5. Isu perusahaan sawit Korea (Korindo) membakar hutan di Papua menjadi ramai. Kompas.com dan detik.com banyak memberitakan karena keduanya kerja sama pemberitaan dengan bbcnews.com. Kantor berita Inggris ini memang digandeng Forensic Architecture dan Greenpeace yang melakukan investigasi di Merauke, Papua.
6. Tempo unggul dalam liputan investigasi karena habitus jurnalisnya dituntut menghasilkan indepth report. Selain itu, ada tim wartawan khusus di desk investigasi. Mereka juga mengembangkan program Investigasi Bersama Tempo yang melibatkan jurnalis dari daerah. Faktor-faktor ini yang tidak ada pada sebagian besar media di Tanah Air.
7. Sejumlah investigasi Tempo terkait isu lingkungan/kehutanan bekerja sama dengan LSM dalam dan luar negeri. Antara lain Auriga Nusantara, Pulitzer Center, Begitu juga dengan media online, yaitu mongabay.com dan betahita.id.
8. Omnibus Law makin menunjukkan cengkraman oligarki dalam kehidupan ekonomi-politik dan media massa di Tanah Air. Kekuatan civil society dilemahkan. Pemerintah (Kementrian Koordinator Perekonomian) kini menggandeng media untuk mensosialisasikan RPP Omnibus Law melalui iklan layanan masyarakat dan sejenisnya. Media independen dan kritis yang anjlok pendapatannya karena pandemic Covid, rentan terhadap hal ini.
9. Peliputan investigasi, apalagi yang ada di Indonesia Tengah dan Timur, membutuhkan dana yang besar. Banyak media besar tidak sanggup membiayainya. Kolaborasi antar media, juga media dengan lembaga non pemerintah untuk melakukan peliputan mendalam (investigasi) sangat mendesak dilakukan. KEHATI dan lembaga konservasi (atau yang bergerak di isu lingkungan) dapat mendanai peliputan kolaboratif tersebut. SIEJ dapat menjadi lead/koordinator untuk peliputan investigasi yang melibatkan antar media.

"The key to the future
of the world is finding
the optimistic stories
and letting them be
known."

- Pete Seeger, 1919-2014.

